

PENGUMUMAN TENDER

No.28/40/DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 9 Oktober 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan **Tender Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI-Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System) Tahun 2026**, dengan nomor Pengadaan RFQ: 57673, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ruang lingkup Pekerjaan secara umum sebagai berikut:

1. Pekerjaan Lumsum

- Melakukan penyediaan lisensi serta ATS atau *subscription*;
- Melakukan kegiatan pengembangan; dan
- Melakukan kegiatan pasca implementasi.

2. Pekerjaan Harga Satuan

Melakukan jasa *enhancement*, jasa terkait kegiatan pasca implementasi, dan jasa *support*.

II. Pagu anggaran sejumlah **Rp167.966.706.635,94 (seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh empat sen)** sudah termasuk PPN 12%.

III. Persyaratan Peserta Tender:

1. Kriteria Prinsipal

- Pengalaman Prinsipal dalam melakukan implementasi produk atau solusi *Fraud Detection System* (FDS) yang dilakukan secara langsung atau melalui mitra kerja (*partner*) minimal 1 (satu) kali sejak 1 Januari 2021 dengan pembuktian melalui dokumen Kontrak / SPPP / PO / SPK / Surat Referensi dari *Client / Work Order / Order Form*. Pengalaman yang disampaikan dapat berupa pengalaman entitas perusahaan secara keseluruhan baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kantor Regional/Anak Perusahaan. Adapun ketentuan Prinsipal sebagai berikut:

1) Prinsipal adalah penyedia *software Fraud Detection System* (FDS);

2) Prinsipal yang mendaftar untuk Pengadaan ini sebagai berikut:

a) Kantor Pusat (*Headquarter*); atau

- b) Kantor Regional/Anak Perusahaan, dengan melampirkan surat keterangan dan dukungan resmi dari Prinsipal Kantor Pusat (*Headquarter*) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sekurang-kurangnya memuat :

(1) Status dan Hubungan Afiliasi: Konfirmasi status dan hubungan resmi antara Prinsipal Kantor Pusat (*Headquarter*) dengan Kantor Regional/Anak Perusahaan.

(2) Kewenangan mengikuti pengadaan: Konfirmasi bahwa Kantor Regional/Anak Perusahaan yang ditunjuk berwenang mengikuti Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026 dan apabila ditetapkan sebagai pemenang, melaksanakan Kontrak sesuai lingkup kewenangan yang diberikan.

(3) Dukungan dan Keberlangsungan Layanan: Komitmen Prinsipal Kantor Pusat (*Headquarter*) untuk menyediakan dukungan teknis, keahlian, sumber daya, solusi atau produk, dan dukungan lainnya yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan dan keberlangsungan layanan selama masa Kontrak (termasuk penyelesaian permasalahan kritis selama Kontrak).

- Produk atau solusi FDS pernah diimplementasikan paling lama sejak 1 Januari 2021 pada bank sentral, bank komersial, penyelenggara infrastruktur pembayaran, atau lembaga keuangan lain dengan pembuktian melalui Kontrak / SPPP / PO / SPK / Surat Referensi dari Klien / *Order Form* dan dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara/Dokumen Pendukung Lainnya yang menunjukkan produk/solusi tersebut telah diimplementasikan (Produk atau solusi FDS yang dimaksud adalah produk atau solusi FDS yang akan ditawarkan untuk Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026).

- Peserta adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi *E-Procurement* dan dalam hal memiliki historis kontrak dengan BI, peserta memiliki kinerja secara umum mayoritas baik pada akhir tahun kontrak periode September 2024 - September 2026.

- Prinsipal dalam Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026 termasuk sebagai *Leader Category* pada laporan *The Forrester Wave Enterprise Fraud Management Chart* atau *Chartis RiskTech Quadrant for Enterprise Fraud Solutions* dalam periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2026 yang dibuktikan melalui publikasi dari laporan *The Forrester Wave Enterprise Fraud Management Chart* atau *Chartis RiskTech Quadrant for Enterprise Fraud Solutions*.

- Menyampaikan Surat Kuasa yang menjelaskan Prinsipal memberikan kuasa kepada Partner Lokal untuk mewakili Prinsipal dan Partner Lokal sebagai Peserta dalam rangka pendaftaran dan proses pemilihan penyedia pada Pengadaan ini dengan format surat sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.



2. Kriteria *Partner Lokal*

- Perusahaan merupakan mitra kerja resmi dan mendapatkan dukungan dari Prinsipal yang dibuktikan dengan surat dukungan dari Prinsipal untuk mengikuti Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026.
- Perusahaan berstatus badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
- Perusahaan memiliki pengalaman dalam pengembangan dan/atau implementasi *Fraud Detection System* minimal 1 kali sejak 1 Januari 2021 yang dibuktikan dengan dokumen Kontrak / SPPP / PO / SPK / *OrderForm / Work Order* dan dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara/Dokumen Pendukung Lainnya yang menunjukkan produk/solusi tersebut telah diimplementasikan.
- Memiliki Laporan Keuangan minimal Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian.
- Telah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun 2025 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP) atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
- Peserta adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi *E-Procurement* dan dalam hal memiliki historis kontrak dengan BI, Peserta memiliki kinerja secara umum mayoritas baik pada akhir tahun kontrak periode September 2024 - September 2026.
- Merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikasi KADIN dengan salah satu klasifikasi sebagai berikut:

Kode	Klasifikasi	Kualifikasi
30501	Teknologi Informasi	Besar
30509	Jasa Pemasok Aplikasi	Besar
20501	Jasa Teknologi Informasi	Besar

- Menyampaikan surat pernyataan untuk mengikuti Pengadaan ini, yang menyatakan:
 - Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak;
 - Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan Kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta lain yang ikut pada Pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan;
 - Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa;
 - Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

IV. Persyaratan pendaftaran:

- Calon Peserta harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
- Syarat dan ketentuan calon Peserta lebih rinci dapat di akses melalui <http://www.bi.go.id/id/layanan/lelang-jasa-barang/default.aspx> atau <https://eprocurement.bi.go.id>.
- Pendaftaran calon Peserta dimulai sejak tanggal **12 s.d. 19 Oktober 2026** melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
- Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.
- Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, agar menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail*: Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.

V. Komitmen Integritas

- Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
- Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
- Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
- Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera melaporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx.



Scan QR Code untuk melihat syarat pendaftaran.

PANITIA TENDER

[Handwritten signatures of the Tender Committee members]

PENGUMUMAN TENDER

No.28/40/DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 9 Oktober 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan **Tender Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI-Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System) Tahun 2026**, dengan nomor Pengadaan RFQ: 57673, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ruang lingkup Pekerjaan secara umum sebagai berikut:

1. Pekerjaan Lumsum

- Melakukan penyediaan lisensi serta ATS atau *subscription*;
- Melakukan kegiatan pengembangan; dan
- Melakukan kegiatan pasca implementasi.

2. Pekerjaan Harga Satuan

Melakukan jasa *enhancement*, jasa terkait kegiatan pasca implementasi, dan jasa *support*.

II. Pagu anggaran sejumlah **Rp167.966.706.635,94 (seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh empat sen)** sudah termasuk PPN 12%.

III. Persyaratan Peserta Tender:

1. Kriteria Prinsipal

- Pengalaman Prinsipal dalam melakukan implementasi produk atau solusi *Fraud Detection System* (FDS) yang dilakukan secara langsung atau melalui mitra kerja (*partner*) minimal 1 (satu) kali sejak 1 Januari 2021 dengan pembuktian melalui dokumen Kontrak / SPPP / PO / SPK / Surat Referensi dari *Client / work Order / Order Form*. Pengalaman yang disampaikan dapat berupa pengalaman entitas perusahaan secara keseluruhan baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kantor Regional/Anak Perusahaan. Adapun ketentuan Prinsipal sebagai berikut:

1) Prinsipal adalah penyedia *software Fraud Detection System* (FDS);

2) Prinsipal yang mendaftar untuk Pengadaan ini sebagai berikut:

a) Kantor Pusat (*Headquarter*); atau

b) Kantor Regional/Anak Perusahaan, dengan melampirkan surat keterangan dan dukungan resmi dari Prinsipal Kantor Pusat (*Headquarter*) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sekurang-kurangnya memuat :

(1) Status dan Hubungan Afiliasi: Konfirmasi status dan hubungan resmi antara Prinsipal Kantor Pusat (*Headquarter*) dengan Kantor Regional/Anak Perusahaan.

(2) Kewenangan mengikuti Pengadaan: Konfirmasi bahwa Kantor Regional/Anak Perusahaan yang ditunjuk berwenang mengikuti Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026 dan apabila ditetapkan sebagai pemenang, melaksanakan Kontrak sesuai lingkup kewenangan yang diberikan.

(3) Dukungan dan Keberlangsungan Layanan: Komitmen Prinsipal Kantor Pusat (*Headquarter*) untuk menyediakan dukungan teknis, keahlian, sumber daya, solusi atau produk, dan dukungan lainnya yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan dan keberlangsungan layanan selama masa Kontrak (termasuk penyelesaian permasalahan kritis selama Kontrak).

- Produk atau solusi FDS pernah diimplementasikan paling lama sejak 1 Januari 2021 pada bank sentral, bank komersial, penyelenggara infrastruktur pembayaran, atau lembaga keuangan lain dengan pembuktian melalui Kontrak / SPPP / PO / SPK / Surat Referensi dari Klien / *Order Form* dan dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara/Dokumen Pendukung Lainnya yang menunjukkan produk/solusi tersebut telah diimplementasikan (Produk atau solusi FDS yang dimaksud adalah produk atau solusi FDS yang akan ditawarkan untuk Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026).

- Peserta adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi *E-Procurement* dan dalam hal memiliki historis kontrak dengan BI, peserta memiliki kinerja secara umum mayoritas baik pada akhir tahun kontrak periode September 2024 - September 2026.

- Prinsipal dalam Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026 termasuk sebagai *Leader Category* pada laporan *The Forrester Wave Enterprise Fraud Management Chart* atau *Chartis RiskTech Quadrant for Enterprise Fraud Solutions* dalam periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2026 yang dibuktikan melalui publikasi dari laporan *The Forrester Wave Enterprise Fraud Management Chart* atau *Chartis RiskTech Quadrant for Enterprise Fraud Solutions*.

- Menyampaikan Surat Kuasa yang menjelaskan Prinsipal memberikan kuasa kepada Partner Lokal untuk mewakili Prinsipal dan Partner Lokal sebagai Peserta dalam rangka pendaftaran dan proses pemilihan penyedia pada Pengadaan ini dengan format surat sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.



2. Kriteria *Partner Lokal*

- a. Perusahaan merupakan mitra kerja resmi dan mendapatkan dukungan dari Prinsipal yang dibuktikan dengan surat dukungan dari Prinsipal untuk mengikuti Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026.
- b. Perusahaan berstatus badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
- c. Perusahaan memiliki pengalaman dalam pengembangan dan/atau implementasi *Fraud Detection System* minimal 1 kali sejak 1 Januari 2021 yang dibuktikan dengan dokumen Kontrak / SPPP / PO / SPK / *Order Form / Work Order* dan dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara/Dokumen Pendukung Lainnya yang menunjukkan produk/solusi tersebut telah diimplementasikan.
- d. Memiliki Laporan Keuangan minimal Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian.
- e. Telah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun 2025 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP) atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
- f. Peserta adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi *E-Procurement* dan dalam hal memiliki historis Kontrak dengan BI, Peserta memiliki kinerja secara umum mayoritas baik pada akhir tahun Kontrak periode September 2024 - September 2026.
- g. Merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikasi KADIN dengan salah satu klasifikasi sebagai berikut:

Kode	Klasifikasi	Kualifikasi
30501	Teknologi Informasi	Besar
30509	Jasa Pemasok Aplikasi	Besar
20501	Jasa Teknologi Informasi	Besar

- h. Menyampaikan surat pernyataan untuk mengikuti Pengadaan ini, yang menyatakan:
 - 1) Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - 2) Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - 3) Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak;
 - 4) Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan Kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - 5) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta lain yang ikut pada Pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan;
 - 6) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa;
 - 7) Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

IV. Pendaftaran calon Peserta Tender dilakukan melalui <https://eprocurement.bi.go.id> dengan batas waktu pendaftaran mulai tanggal **12 s.d. 19 Oktober 2026**, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon Peserta Tender dan mengunggah dokumen (tidak dalam bentuk *link*) ke <https://eprocurement.bi.go.id> yang terdiri atas:

1. Kriteria Prinsipal:

- a. *Scan* Kontrak / SPPP / PO / SPK / Surat Referensi dari *Client / Work Order / Order Form* yang membuktikan Prinsipal memiliki Pengalaman dalam implementasi produk atau Solusi *Fraud Detection System* (FDS) yang dilakukan secara langsung atau melalui mitra kerja (*partner*) minimal 1 (satu) kali sejak 1 Januari 2021. Pengalaman yang disampaikan dapat berupa pengalaman entitas perusahaan secara keseluruhan baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kantor Regional/Anak Perusahaan.
- b. *Scan* surat keterangan dan dukungan resmi dari Prinsipal Kantor Pusat (*Headquarter*) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Status dan Hubungan Afiliasi: Konfirmasi status dan hubungan resmi antara Prinsipal Kantor Pusat (*Headquarter*) dengan Kantor Regional/Anak Perusahaan.
 - 2) Kewenangan mengikuti pengadaan: Konfirmasi bahwa Kantor Regional/Anak Perusahaan yang ditunjuk berwenang mengikuti Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026 dan apabila ditetapkan sebagai pemenang, melaksanakan Kontrak sesuai lingkup kewenangan yang diberikan.
 - 3) Dukungan dan Keberlangsungan Layanan: Komitmen Prinsipal Kantor Pusat (*Headquarter*) untuk menyediakan dukungan teknis, keahlian, sumber daya, solusi atau produk, dan dukungan lainnya yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan dan keberlangsungan layanan selama masa Kontrak (termasuk penyelesaian permasalahan kritis selama Kontrak);
- c. *Scan* Kontrak / SPPP / PO / SPK / Surat Referensi dari Klien / *Order Form* dan dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara/Dokumen Pendukung Lainnya yang menunjukkan produk/solusi tersebut telah diimplementasikan (Produk atau solusi FDS yang dimaksud adalah produk atau solusi FDS yang akan ditawarkan untuk Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026);



- d. Bukti publikasi dari laporan *The Forrester Wave Enterprise Fraud Management Chart* atau *Chartis RiskTech Quadrant for Enterprise Fraud Solutions*, yang menunjukkan bahwa Prinsipal dalam Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026 termasuk sebagai *Leader Category* pada laporan *The Forrester Wave Enterprise Fraud Management Chart* atau *Chartis RiskTech Quadrant for Enterprise Fraud Solutions* dalam periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2026;
- e. *Scan* Surat Kuasa yang menjelaskan Prinsipal memberikan kuasa kepada *Partner* Lokal untuk mewakili Prinsipal dan *Partner* Lokal sebagai Peserta dalam rangka pendaftaran dan proses pemilihan penyedia pada Pengadaan ini dengan format surat sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

2. Kriteria *Partner* Lokal

- a. *Scan* Surat Permohonan menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) diatas meterai Rp10.000,00;
 - b. *Scan* surat dukungan yang membuktikan merupakan mitra kerja resmi dan mendapatkan dukungan dari Prinsipal yang dibuktikan dengan surat dukungan dari Prinsipal untuk mengikuti Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI - *Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System)* Tahun 2026;
 - c. *Scan* Kontrak/SPPP/SPK/PO yang membuktikan bahwa Perusahaan memiliki pengalaman dalam pengembangan dan/atau implementasi *Fraud Detection System* minimal 1 kali sejak 1 Januari 2021 dan dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara/Dokumen Pendukung Lainnya yang menunjukkan produk/solusi tersebut telah diimplementasikan;
 - d. *Scan* Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian sebagaimana butir III.2.d di atas;
 - e. *Scan* bukti pemenuhan kewajiban perpajakan Tahun 2025 sebagaimana butir III.2.e di atas;
 - f. *Scan* sertifikasi dari KADIN sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.2.g di atas dan masih berlaku;
 - g. *Scan* surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00, yang memuat poin-poin pernyataan sebagai berikut:
 - 1) Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - 2) Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - 3) Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak;
 - 4) Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan Kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - 5) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta lain yang ikut pada Pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan;
 - 6) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa;
 - 7) Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.
- V. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.
- VI. Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, silakan menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail*: Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.
- VII. Komitmen Integritas
1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
 2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
 3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
 4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera melaporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx.

PANITIA TENDER

**KOP PERUSAHAAN
SURAT PERMOHONAN**

No. / /

Kepada :

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA

**Perihal: Permohonan Menjadi Peserta Tender Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI-
Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System) Tahun 2026**

Dengan hormat,

Setelah kami membaca dan meneliti Pengumuman Tender No. tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penangguna Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT.

Bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi Peserta **Tender Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI-Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System) Tahun 2026**.

Kami menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta melepaskan Bank Indonesia dari semua gugatan hukum apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam data kami dan menyadari sepenuhnya bahwa Peserta yang lulus seleksi yang dapat ikut serta dalam proses Tender berikutnya.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, ...
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
Tanda-tangan Direktur Utama/
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung
Jawab Perusahaan dan cap
perusahaan

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT.

Dalam rangka mengikuti **Tender Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI-Payment Clear On Transaction (Fraud Detection System) Tahun 2026**, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
2. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
3. Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak;
4. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan Kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
5. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta lain yang ikut pada Pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan;
6. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan Barang dan/atau Jasa;
7. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan tersebut di atas termasuk konsekuensinya apabila ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar.

Jakarta, ...
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)
Tanda-tangan Direktur Utama/
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung
Jawab Perusahaan dan cap
perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.

SURAT KUASA KHUSUS	SPECIAL POWER OF ATTORNEY
Nomor: [●]/[●]/[●]	Number: [●]/[●]/[●]
Yang bertanda tangan di bawah ini:	The undersigned:
Nama : [●] Jabatan : [●] (<i>Direktur Utama/Direktur/Pimpinan yang berwenang</i>) Perusahaan : [Nama lengkap Prinsipal] Alamat : [Alamat lengkap Prinsipal] Negara : [●], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama lengkap perusahaan Prinsipal], suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum [●], berdasarkan [Akta Pendirian/ Articles of Incorporation/ Certificate of Incorporation] Nomor [●] tanggal [●], [masukkan indentitas lain yang secara internal butuh untuk dicantumkan oleh Bank Indonesia], yang selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"; dan	Name : [●] Position : [●] (<i>President Director/Director/Authorized Representative</i>) Company : [Full name of Authorizer] Address : [Full address of Authorizer] Country : [●], acting for and on behalf of [Full name of Authorizer's company], a company established and subject to the laws of [●], based on [Deed of Establishment/ Articles of Incorporation/ Certificate of Incorporation] Number [●] dated [●], [insert other identity details required to be included by Bank Indonesia], hereinafter referred to as "Authorizer"; and
Nama : [●] Jabatan : [●] (<i>Direktur Utama/Direktur/Pimpinan yang berwenang</i>) Perusahaan : [Nama lengkap <i>Partner</i> Lokal] Alamat : [Alamat lengkap <i>Partner</i> Lokal di Indonesia], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama lengkap <i>Partner</i> Lokal], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor [●] tanggal [●] dan Akta Perubahan terakhir Nomor [●] tanggal [●], [masukkan indentitas lain yang secara internal butuh untuk dicantumkan oleh Bank Indonesia yang selanjutnya disebut "Penerima Kuasa".	Name : [●] Position : [●] (<i>President Director/Director/Authorized Representative</i>) Company : [Full name of Local <i>Partner</i>] Address : [Full address of Local <i>Partner</i> in Indonesia], acting for and on behalf of [Full name of Local <i>Partner</i>], a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, based on Deed of Establishment Number [●] dated [●] and the latest Amendment Deed Number [●] dated [●], [insert other identity details required to be included by Bank Indonesia], hereinafter referred to as "Authorized".
Bahwa:	Whereas:
(a) Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa secara bersama-sama bermaksud untuk mengikuti proses Tender Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI-Payment Clear on Transaction (Fraud Detection System) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Peserta;	(a) the Authorizer and the Authorized jointly intend to participate in the Procurement Process for the Development and Maintenance of BI-Payment Clear on Transaction (Fraud Detection System) 2026 organized by Bank Indonesia, as Participants;
(b) berdasarkan ketentuan [masukkan nama dokumen resmi RKS terkait], beserta perubahannya (selanjutnya disebut "RKS"), Prinsipal memberikan kuasa kepada <i>Partner</i> Lokal untuk melakukan pendaftaran pengadaan untuk dan atas nama Prinsipal sebagai Peserta; dan	(b) pursuant to the provisions of [insert official name of the relevant RKS document], as amended (hereinafter referred to as the "RKS"), the Authorizer grants a power of attorney to the Local <i>Partner</i> to carry out procurement registration for and on behalf of the Authorizer as a Participant; and
(c) kecuali ditentukan lain dalam surat kuasa ini, istilah-istilah yang ditulis dengan huruf kapital dalam surat kuasa ini memiliki arti	(c) unless otherwise specified in this power of attorney, capitalized terms used in this

yang sama sebagaimana didefinisikan dalam RKS.	power of attorney shall have the same meanings as defined in the RKS.
Bahwa Pemberi Kuasa dengan ini memberikan:	That the Authorizer hereby grants:
KUASA KHUSUS	SPECIAL POWER OF ATTORNEY
kepada Penerima Kuasa, tanpa hak substitusi, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	to the Authorized, without the right of substitution, to carry out the following:
1. Melakukan pendaftaran pada aplikasi <i>E-Procurement</i> Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Peserta dalam proses Pengadaan Pengembangan dan Pemeliharaan BI-Payment Clear on Transaction (Fraud Detection System) Tahun 2026, sebagaimana diatur dalam RKS yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.	1. Register on Bank Indonesia's <i>E-Procurement</i> application for and on behalf of the Authorizer as a Participant in the Procurement Process for the Development and Maintenance of BI-Payment Clear on Transaction (Fraud Detection System) 2026, as regulated in the RKS organized by Bank Indonesia.
2. Menyampaikan Dokumen Penawaran (meliputi Surat Penawaran, Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis, dan Dokumen Biaya) melalui aplikasi <i>e-Procurement</i> Bank Indonesia, baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> , untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Peserta.	2. Submit the Bid Documents (including the Bid Letter, Administrative Documents, Technical Documents, and Cost Documents) through Bank Indonesia's <i>e-Procurement</i> application, whether online or offline, for and on behalf of the Authorizer as a Participant.
3. Menandatangani Surat Penawaran dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang dipersyaratkan dalam proses pengadaan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Peserta.	3. Sign the Bid Letter and other related documents required in the procurement process for and on behalf of the Authorizer as a Participant.
4. Menyampaikan jaminan penawaran berupa bank garansi (asli dan salinannya), baik secara langsung kepada Panitia Pengadaan maupun melalui aplikasi <i>E-Procurement</i> , untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Peserta, termasuk memperpanjang jangka waktu jaminan penawaran apabila diperlukan sesuai ketentuan RKS.	4. Submit the bid security in the form of a bank guarantee (original and copies), whether directly to the Procurement Committee or through the <i>E-Procurement</i> application, for and on behalf of the Authorizer as a Participant, including extending the validity period of the bid security if required under the RKS.
5. Menyerahkan kepada Panitia Pengadaan atau mengunggah pada aplikasi <i>E-Procurement</i> surat pernyataan Pemberi Kuasa yang telah ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, beserta dokumen administrasi pendukung lainnya yang dipersyaratkan atas nama Pemberi Kuasa dalam proses pengadaan.	5. Deliver to the Procurement Committee or upload to the <i>E-Procurement</i> application the Authorizer's declaration letter signed by the Authorizer, along with other required supporting administrative documents on behalf of the Authorizer in the procurement process.
6. Menerima segala korespondensi, pemberitahuan, undangan, dan/atau	6. Receive all correspondence, notices, invitations, and/or information from Bank

informasi dari Bank Indonesia atau Panitia Pengadaan sehubungan dengan proses pengadaan ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, termasuk namun tidak terbatas pada pemberitahuan pemenang pengadaan dan undangan penandatanganan Kontrak.	Indonesia or the Procurement Committee in connection with this procurement process for and on behalf of the Authorizer, including but not limited to notices of procurement award and invitations to sign the Contract.
7. Apabila Peserta ditetapkan sebagai pemenang, menyerahkan jaminan pelaksanaan Pekerjaan sebagai pengganti jaminan penawaran untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pelaksana Pekerjaan, sesuai ketentuan RKS.	7. If the Participant is declared the winner, submit the performance security as a replacement for the bid security for and on behalf of the Authorizer as the Works Executor, in accordance with the RKS.
Kuasa ini tidak mencakup kewenangan untuk:	This power of attorney does not include the authority to:
a. menghadiri Rapat Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>);	a. attend the Pre-Bid Meeting (<i>Aanwijzing</i>);
b. menghadiri proses klarifikasi dan negosiasi biaya;	b. attend the clarification and cost negotiation process;
c. menandatangani Kontrak atau perjanjian apapun atas nama Pemberi Kuasa;	c. sign the Contract or any agreement on behalf of the Authorizer;
d. mengubah, menambah, atau mengurangi substansi Dokumen Penawaran yang telah disetujui oleh Pemberi Kuasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa; dan	d. amend, add to, or reduce the substance of the Bid Documents that have been approved by the Authorizer without prior written consent from the Authorizer; and
e. bertindak melampaui lingkup kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa ini.	e. act beyond the scope of authority granted in this power of attorney.
Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan dicabut secara tertulis oleh Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa menyatakan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam lingkup kuasa sebagaimana dimaksud di atas mengikat Pemberi Kuasa.	This power of attorney is valid from the date of signing until revoked in writing by the Authorizer. The Authorizer declares that all actions taken by the Authorized within the scope of authority as referred to above shall be binding on the Authorizer.
Surat kuasa ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.	This power of attorney is made, interpreted, and executed based on and subject to the laws of the Republic of Indonesia.
Surat kuasa ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.	This power of attorney is made in the Indonesian language and the English language. In the event of any discrepancy in interpretation between the Indonesian version and the English version, the Indonesian version shall prevail.
Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani di [●] pada tanggal [●] untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	This power of attorney is made and signed in [●] on [●] for use as intended.

PEMBERI KUASA/ <i>AUTHORIZER</i>,	
Nama/ <i>Name</i>	:
Jabatan/ <i>Position</i>	:
Nama Perusahaan Prinsipal/ <i>Name of Authorizer's Company</i>	:

PENERIMA KUASA/ <i>AUTHORIZED</i>,	
Nama/ <i>Name</i>	:
Jabatan/ <i>Position</i>	:
Nama Perusahaan <i>Partner</i> Lokal/ <i>Name of Local Partner's Company</i>	: